

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Pada disertasi yang dibuat oleh Haliah (2012) menyatakan teori stewardship merupakan teori yang dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Menurut Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) dalam Haliah (2012) menyatakan teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi atas tujuan individu, melainkan sebagai pengelola yang motivasinya selaras dengan tujuan principal mereka. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintahan lebih mementingkan kebutuhan yang lebih tinggi seperti pertumbuhan entitas, prestasi, maupun aktualisasi diri. Dalam teori ini rakyat berperan sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto, dkk (2015) mengatakan bahwa pemerintah dianggap telah bekerja atas dasar motivasi dan pengabdian terhadap masyarakat. Pemerintah paham bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumberdaya yang ada dan tidak ada motivasi secara finansial yang mendasari tindakan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Mereka harus menggunakan wewenang mereka untuk untuk kepentingan organisasi secara jangka panjang.

Mahmud (2015) mengatakan bahwa rakyat yang nantinya akan secara langsung mengawasi kinerja pemerintah sehingga membutuhkan informasi yang mendukung jalannya pengawasan tersebut. Dimana informasi tersebut berupa laporan keuangan yang telah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2012) menyatakan teori ini lebih mengarah pada pendekatan *governance* yaitu menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dengan mempertimbangkan faktor sosiologis maupun faktor psikologis. Pada pertimbangan melalui faktor sosiologis dilakukan pada saat melakukan analisis variabel pengendalian internal dan kompetensi sumberdaya manusia dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. pada faktor psikologis dilakukan pada saat analisis variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah serta pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

Tujuan pemerintah yang ingin dicapai ini didasari dari berbagai kepercayaan. Teori ini berasumsi bahwa pemerintah bertindak sesuai keinginan masyarakat. Menurut David (2006) dalam jurnalnya mengatakan "*Public managers supported the proposition that trust is at the center of contractual relationships and is the single most important criterion in how and under what conditions providers are to be managed.*" Hal tersebut berarti kepercayaan tersebut tercapai berdasarkan interaksi yang telah terjadi secara terus menerus dan berulang dari waktu ke waktu dimana tujuan yang ada tercapai dengan tanggapan dan konsisten

diberikan kepada pernyataan dan informasi yang tersedia secara tepat waktu.

2. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dalam perspektif islam dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan baik buruknya sesuatu atau kadar. Menurut Fandy Tjiptono (2006) menyatakan bahwa “Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan”. Menurut Kotler (2012) menyatakan bahwa “ kualitas sebagai keseluruhan ciri sifat atau sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuannya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen baik yang dinyatakan maupun yang tersirat”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas merupakan baik buruknya suatu produk, jasa, proses, maupun lingkungan yang diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan konsumennya.

Laporan Keuangan menurut Thahir (2014) yaitu “Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas lain di luar perusahaan”. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2002) yaitu “Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya, laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasional suatu entitas yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, CALK.

Dengan pengertian pengertian yang telah ada dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan kadar baik buruknya hasil dari kegiatan operasional dari suatu entitas yang dapat merupakan neraca,

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, CALK dan materi penjelasan yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan.

Sebuah laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah :

a. Relevan

Sebuah laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa yang ada di masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka yang ada di masa lalu. Hal tersebut mengakibatkan informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan tersebut memiliki karakteristik:

1) Memberikan manfaat Umpan balik atau *feedback value*

Informasi yang ada dalam laporan keuangan memungkinkan penggunaannya untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kerja masa lalu dan memberikan umpan balik atau *feedback value* dalam rangka

perencanaan keuangan dan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

2) Memberikan manfaat predictive atau *predictive value*

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat membantu penggunaannya untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil yang ada pada masa lalu dan kejadian yang ada pada masa kini. Laporan keuangan yang berkualitas akan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa yang akan datang.

3) Disajikan tepat waktu atau *timeliness*

Informasi yang ada dalam laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu sehingga informasi tersebut dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah atau pengguna.

4) Lengkap

Informasi yang ada dalam laporan keuangan disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang ada dan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

b. Andal

Anda di sini berarti informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Untuk dapat dikatakan handal informasi tersebut harus memenuhi karakteristik :

1) Penyajian jujur

Informasi yang ada dalam sebuah laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Laporan keuangan yang berkualitas harus terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi dalam laporan keuangan tersebut.

2) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda dan harus tetap menunjukkan kesimpulan yang hasilnya tidak berbeda jauh. Laporan keuangan yang berkualitas jika dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit independen.

3) Netralitas

Informasi yang ada nantinya diarahkan kepada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Penyajian laporan keuangan tidak bersifat bias terhadap kepentingan suatu kelompok tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pada pelaporan lain. Perbandingan tersebut dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan yang dilakukan secara internal dapat dilakukan dengan suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, sedangkan perbandingan yang dilakukan secara eksternal dapat dilakukan jika entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila suatu entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang telah diterapkan, perubahan tersebut nantinya diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Suatu laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Purwanto (2010) mengatakan “pemahaman merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan *testee* mampu memahami arti atau

konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya”. Sedangkan menurut Suharsimi (2009) menyatakan bahwa “pemahaman merupakan bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh,menuliskan kembali dan memperkirakan”. Menurut pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang tidak hanya dalam memahami suatu konsep, namun juga dapat menerangkan dan memberikan contoh mengenai hal yang diketahuinya.

Standar akuntansi pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 yaitu “standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan pemerintah”. Menurut Wijaya (2008) dalam Rian (2012) menyatakan “Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia.”. Menurut pengertian diatas standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip atau pedoman pertama yang digunakan digunakan untuk mengatur, dan menyelaraskan presepsi dalam penyusunan dan penyajian laporan pemerintah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah yaitu kemampuan seseorang dalam memahami prinsip yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian dalam laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan yang benar tersebut

diperlukan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD yang berupa dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari setidaknya laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Adanya penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah guna untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Mahmudi (2011) Standar Akuntansi Pemerintahan ini merupakan aspek penting yang perlu dikembangkan untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan negara, pertanggung jawaban, seluruh praktik akuntansi dalam pemerintahan.

Indra Bastian (2010) mengatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan guna mewujudkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu, dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum. Begitu juga salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah menurut Nunuy Nur Aniyah (2009) mengatur 3 hal utama yaitu :

a. Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sehingga akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan ini yang akan diwujudkan dalam bentuk pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan yang terpengaruh oleh kejadian yang terkait. Untuk menentukan peristiwa atau kejadian tersebut apakah memenuhi persyaratan pengakuan maka perlu dipertimbangkannya aspek materalitas.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos kedalam laporan keuangan. Pengukuran di dalam pos-pos yang ada dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk nilai aset tersebut. kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

c. Pengungkapan

Laporan keuangan yang baik berisi seluruh informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga

dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Sejalan dengan tujuan dasar akuntansi, salah satu tujuan yang dicapainya adalah penyajian informasi yang cukup sehingga perbandingan dari hasil yang diharapkan dapat dilakukan. Informasi yang dibutuhkan tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

1) Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pemerintah daerah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka pemerintah daerah atau entitas tersebut harus menyajikan laporan demikian.

2) Nilai Hiatoris

Mahmudi (2011) Pencatatan didasarkan pada nilai historis aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban akan dicatat sebesar jumlah kas dan juga setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis ini lebih dapat

diandalkan dari pada penilaian yang lain, Hal tersebut dikarenakan nilai historis lebih objektif dan dapat diverifikasi. Apabila jika tidak ada nilai historis maka akan digunakan nilai wajar terhadap aset atau kewajiban terkait.

3) Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah di otoritas kan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi nantinya akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Jika LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010.

4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Akuntansi lebih mengutamakan substansi suatu transaksi bukan sekedar aspek legal formalnya saja.

5) Periodisitas

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas laporan perlu dibagi menjadi beberapa periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki entitas tersebut dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

6) Konsistensi

Arfan Ikhsan (2009) bahwa prinsip konsistensi telah dikembangkan untuk menjamin perbandingan dan konsistensi dari prosedur-prosedur dan teknik-teknik yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan dari periode akuntansi berikutnya.

7) Pengungkapan lengkap

Arfan Ikhsan (2009) mengatakan prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan atau entitas harus memberikan informasi yang cukup bagi pihak-pihak diluar perusahaan, sehingga pihak-pihak tersebut dapat mengambil keputusan yang informatif.

8) Penyajian Wajar

Mahmudi (2011) laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

4. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Penerapan merupakan perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Sistem menurut Azar (2013) merupakan “kumpulan dari subsistem/ komponen/ bagian baik fisik/ non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Menurut Mulyadi (2013) menyatakan bahwa “Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan sistem yang saling berhubungan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Informasi menurut McLeod yang dikutip oleh Yakub (2012) mengatakan bahwa “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. Sedangkan Menurut Tata Sutabri (2012) pada buku yang berjudul Analisis Sistem Informasi, pengertian Informasi adalah “data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan”. Jadi informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan dan telah diolah yang nantinya akan digunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan.

Akuntansi menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016) “pengertian akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”. Menurut Rizal Effendi (2013) akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, menggolongkan, dan pengikhtisaran serta pelaporan mengenai informasi

keuangan yang diukur dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu entitas yang ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut *American Institute of Certified Publik Accountants (AICPA)* merupakan “*The art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events which are, in part at least of financial character, and interpreting the result thereof*”. Jadi akuntansi merupakan proses pengidentifikasi, pencatatan, penggolongan yang dihasilkan oleh suatu entitas untuk menghasilkan dan melaporkan suatu informasi bagi pihak yang memiliki kepentingan.

Pada pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yaitu proses mempraktekkan suatu kumpulan teori atau metode yang saling berhubungan yang selanjutnya diolah menjadi informasi yang akan dilaporkan kepada pihak yang memiliki kepentingan.

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Wibowo (2012) “Kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan pekerjaan atau tugas yang didasari ketrampilan maupun pengetahuan dan didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan”. Sedangkan menurut Spencer&Spencer dalam Moeheriono (2013) mengatakan bahwa kompetensi merupakan “karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya tau karakteristik dasar individu yang dimiliki hubungan

kasual atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif, atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu”. Jadi dapat disimpulkan kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seorang individu dalam melaksanakan tugas yang memiliki hubungan kausal dengan kriteria yang dijadikan acuan.

Sumber Daya Manusia menurut Nawawi (2011) merupakan “tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan kedalam potensi nyata fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi”.

Jadi kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan yang dimiliki individu yang berfungsi sebagai modal non material dalam suatu organisasi demi mewujudkan eksistensi organisasi tersebut.

6. Sistem Pengendalian Internal

Mahmudi (2010) mengatakan pengertian pengendalian intern merupakan “suatu proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen eksekutif dan jajaran untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”. IAPI (2011) yang dikutip oleh Agoes (2012) mendefinisikan mengenai pengendalian internal yaitu merupakan suatu

proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan juga personel lain dalam suatu entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tiga golongan berikut ini yaitu : yang pertama adalah keandalan terhadap pelaporan keuangan, yang kedua yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh personel-personel suatu entitas agar tercapainya tujuan entitas dengan pencapaian pada keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dapat disimpulkan sistem pengendalian internal merupakan kumpulan proses yang dilakukan para personel entitas untuk mencapai tujuan entitas dengan melakukan pencapaian pada keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Dalam pemerintahan Mardi (2011) mengatakan bahwa Pengendalian internal memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan
- b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi
- c. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
- d. Membantu menjaga kebijakan manajemen yang telah ditetapkan

Unsur sistem pengendalian internal disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 yang meliputi :

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian sendiri merupakan elemen yang terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian itu sendiri, lingkungan pengendalian ini berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan kompetensi. Hal tersebut mengakibatkan pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap Pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian resiko

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atau risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam suatu entitas tersebut. Penilaian risiko tersebut terdiri atas identifikasi risiko dan analisis resiko. Penilaian risiko tersebut diawali dengan adanya penetapan maksud dan tujuan pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Selanjutnya pemerintah akan mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah tersebut. Setelah adanya pengidentifikasian tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Penaksiran risiko mencakup:

1) Identifikasi risiko

Risiko tersebut diidentifikasi secara efisien dan efektif dan kemudian ditelaah risiko mana yang dapat mencapai tujuan instansi baik yang bersumber dari dalam maupun luar pemerintah.

2) Analisis risiko

Analisis risiko merupakan menentukan apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari risiko yang telah diidentifikasi tersebut terhadap pencapaian tujuan pemerintah.

3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan pemerintah untuk mengurangi Risiko yang telah diidentifikasi selama penilaian risiko.

4) Informasi dan komunikasi

Informasi yang ada harus dicatat dan nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan pemerintah dan pihak lain yang telah ditentukan. Informasi tersebut disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawab secara tepat waktu. Informasi yang didapatkan oleh pimpinan harus relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal entitas. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan pemerintah dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang

memerlukan dalam bentuk serta dalam kerangka waktu yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan Pengendalian internal dan tanggung jawab operasional. Pimpinan pemerintah menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- 5) Pimpinan telah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif berupa buku pedoman kebijakan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail, dan arahan lisan.
- 6) Pimpinan telah melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai di seluruh organisasi dan memperlihatkan dukungan terhadap Pengendalian internal.

c. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan ini dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah

diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem Pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian internal. Evaluasi terpisah terhadap Pengendalian internal dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan nantinya akan diteliti lebih lanjut.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) No 71 yang dikeluarkan tahun 2010 membahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada PP pasal 1 menyebutkan jika akuntansi merupakan proses yang didalamnya terdapat pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengintrepretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sendiri merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian dalam laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat untuk dipertanggung jawabkan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang benar tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN/ APBD yang berupa dalam bentuk laporan keuangan yang setidaknya laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Adanya penerapan dan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang disusun oleh pegawai pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang mengharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu, memberikan informasi yang lengkap, akurat dan mudah dipahami berbagai pihak terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam menjalankan tugasnya (PP No. 71/2010).

Secara prinsip aktivitas akuntansi merupakan alat pengendali diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas para manajer atas pengelolaan sumber daya manusia maupun keuangan dalam suatu entitas. Dimana para pembuat laporan keuangan harus paham betul mengenai standar pembuatan laporan keuangan yang benar. Sehingga pemerintahan dapat menjadi lembaga yang dipercaya untuk membuat pertanggung jawaban keuangan yang telah diamanahkan. Pada kabupaten Klaten sendiri pencatatan yang dilakukan oleh pegawai masih terdapat kesalahan seperti pencatatan terhadap aset donasi yang seharusnya dicatat sebagai nilai wajar pada saat perolehannya sehingga tidak sesuai dengan PSAP No.07.

Sehingga peneliti melihat adanya hubungan antara variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan

keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Karena apabila pegawai pemerintah paham mengenai standar akuntansi pemerintah yang diterapkan pada pembuatan laporan keuangan, diduga hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) menyatakan bahwa SAP secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Jembrana. Hal ini dikarenakan aparatur pemerintahan khususnya pegawai pengelola keuangan memiliki wawasan yang mendalam mengenai standar akuntansi pemerintahan, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cornelia dkk (2016) yang dikutip dalam penelitian I Wayan dan I Gusti (2017) juga menyatakan bahwa kualitas pada laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh efektivitas dalam penerapan standar akuntansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika (2015) memberikan hasil pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di pemerintahan Kabupaten Kuantann Singingi. Hal ini dapat dilihat dari jelasnya prosedur serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut juga dapat ditinjau dari pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Umar Sako dkk (2018) menyatakan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian tersebut, variabel standar akuntansi pemerintah merupakan standar yang paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dibanding variabel-variabel lain yang ada.

H1 : Pemahaman SAP berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemda.

2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dengan Kualitas Laporan Keuangan

Proses sistem informasi akuntansi sendiri terdiri dari input, output, penyimpanan data, processor, pengguna, dan tindakan pengendalian. Data yang ada nantinya akan dimasukkan kedalam sistem informasi yang selanjutnya akan diproses dan diubah menjadi sebuah informasi yang berguna. Didalam pelaksanaan pemerintahan daerah, sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh masing-masing SKPD yang ada didalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif jika pegawai/staf dalam lembaga-lembaga pemerintah dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Laporan keuangan tersebut nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan guna dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tanggung jawab pemerintah daerah. Pengambilan keputusan yang baik dan benar diharapkan mampu untuk memenuhi tujuan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat secara maksimal. Pada pemerintahan kabupaten Klaten sendiri, pemerintah dan perangkatnya dituntut untuk

dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan data, informasi dan pelayanan publik³.

Sehingga menurut peneliti, terdapat hubungan antara variabel penerapan informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan. Karena adanya penggunaan sistem informasi akuntansi oleh SKPD dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan diduga akan lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Banda Aceh. Semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi di Banda Aceh ini maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmi Juwita (2013) yang menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penilaian responden terhadap penerapan sistem informasi akuntansi tertinggi terdapat pada dimensi *software* dan terdokumentasinya prosedur. Hal tersebut dapat di jelaskan bahwa *software* yang baik memiliki pengendalian yang baik, *software* yang baik menunjukkan pengolahan data yang baik pula sehingga kemungkinan kesalahan pengolahan data sangat minim, dengan demikian *software* yang baik akan menghasilkan output berupa laporan keuangan yang baik pula, demikian juga dengan

³ Diterbitkan di Klatenkab.go.id yang berjudul “Master Plan E-Governmen Pemerintah Kabupaten Klaten” pada tahun 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

terdokumentasinya prosedur yang baik akan merekam seluruh transaksi dan prosedur dengan tepat, sehingga laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang sangat lengkap dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pengambil keputusan.

Meilani Purwanti dan Wasman (2014) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penerapan ini memberikan pengaruh terhadap dokumen atau formulir dan laporan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2014) menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana di dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan suatu system informasi yang terkomputerisasi terkomputerisasi yang digunakan dalam pengelolaan penyusunan laporan keuangan dengan cara memasukkan data-data keuangan sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan. Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini pemerintah Kabupaten Jembrana dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Irzal Tawaqal dan Suparno (2017) juga menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi maka

laporan yang dibuat akan memberikan hasil yang relevan dan dapat dibandingkan, hal tersebut dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan keputusan.

H2 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemda.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan

Tjiptoherijanto (2001) menyatakan “untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut”. *Level of responsibility* atau tingkat tanggung jawab juga dapat dilihat dari tingkat jabatan yang dimiliki oleh seseorang karena setiap jabatan memiliki deskripsi jabatan yang berbeda. Deskripsi jabatan haruslah jelas karena dengan jika deskripsi jabatan tersebut buruk, sumber daya yang ada tersebut tidak akan menjalankan tugasnya dengan baik, sedangkan pada kompetensi yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari skill yang dimiliki, maupun latar belakang pendidikan orang tersebut, dan juga pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti.

Sumber daya manusia dipercaya dapat memberikan hubungan positive dimana sumberdaya manusia membawa manusia secara sosial ke dalam organisasi, yang mana cenderung berfungsi sebagai sumberdaya kritis yang menghasilkan suatu keunggulan. Teori stewardship ini dapat

dianggap sebagai kemampuan untuk membantu menyelaraskan sumberdaya organisasi yang penting, seperti modal manusia dan modal sosial. Teori ini membangun modal manusia di pemerintahan dengan memberikan sinyal pada pasar bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik dengan melihat hasil pada laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah. Jika pegawai cenderung senang dalam bekerja di pemerintahan, mereka akan cenderung memberikan sinyal penting kepada orang luar mengenai keuntungan bekerja untuk entitas ini, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia untuk pemerintahan. Selain itu, dengan membangun hubungan tingkat kepengurusan yang kuat, pemerintahan ini kemungkinan akan menumbuhkan rasa berkomitmen para pegawai yang lebih besar yang akan menyebabkan tingkat sumberdaya dan masyarakat yang lebih baik lagi.

Kompetensi sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas dimana sumber daya manusia tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan yang cukup atau bahkan baik. Jika yang melaksanakan fungsi ini tidak memiliki kemampuan maka akan menghambat proses akuntansi tersebut dan bahkan dapat mengakibatkan kegagalan pada proses penyusunan laporan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang baik, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ika dan Dewi (2017) menyatakan bahwa sumberdaya manusia yang terdapat di pemerintahan

kabupaten Klaten yang kurang tanpa adanya kompetensi di bidang akuntansi dalam menjalankan tugasnya membuat banyak pihak yang meragukan proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal ini menyebabkan Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Maka diperlukan adanya pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.

Sehingga peneliti melihat adanya hubungan antara kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Peneliti menduga semakin baik kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintahan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dibuat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian tersebut menunjukkan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan yang ada.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati dkk (2014) dan Megawati dkk (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya kompetensi sumberdaya manusia dapat diketahui mengenai suatu pemerintahan yang telah berjalan secara efektif, efisien, dan profesional. Sehingga dengan adanya kompetensi sumberdaya manusia yang baik akan mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Irzal (2017), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten maka waktu penyusunan laporan keuangan akan dapat dipersingkat, hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya.

Hasil serupa didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Karsana dan I Gusti Ngurah Agung Suryana (2017) menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan dimana semakin baik kompetensi sumberdaya yang dimiliki maka akan semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Sumberdaya manusia berkompeten akan mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas dimana hal tersebut akan memudahkan dalam pengambilan keputusan.

H3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemda.

4. Sistem Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian internal menurut Gondodiyoto (2007) merupakan “suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (*preventif*), mendeteksi (*detektif*), dan memberikan mekanisme pembetulan (*korektif*) terhadap potensi/ kemungkinan terjadinya kesalahan (kekeliruan,

kelalaian, *error*) maupun penyalahgunaan (kecurangan, *fraud*)". Sistem akuntansi yang lemah dapat menyebabkan pengendalian internal yang lemah pula. Hal tersebut dinyatakan oleh Mardiasmo (2004) dan dengan adanya sistem pengendalian internal yang lemah dapat mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang kurang baik pula.

Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, untuk melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal berisi prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai. Jadi, sistem pengendalian yang ada pada pemerintah daerah dirancang untuk memudahkan pegawai atau aparatur untuk mencapai tujuan dari pemerintahan daerah itu sendiri.

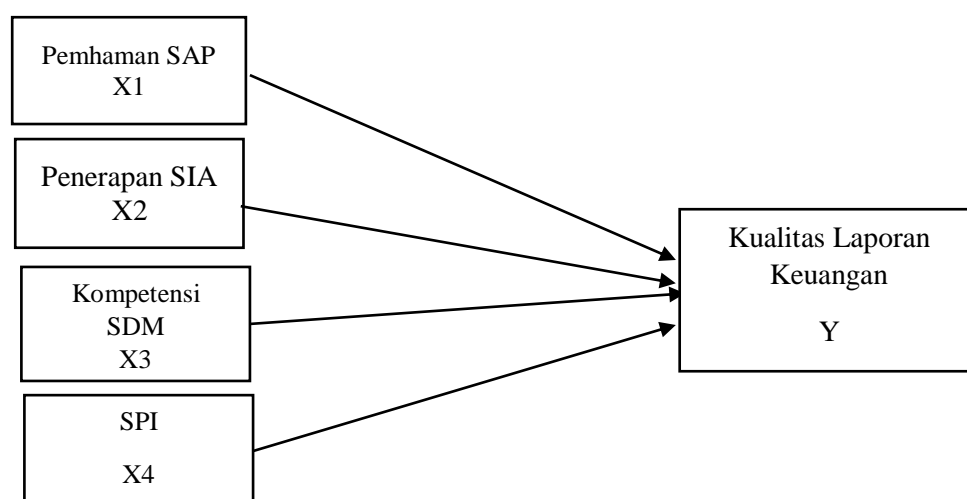
Peneliti melihat adanya hubungan antara variabel sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan. Hal ini diduga bahwa dengan adanya sistem pengendalian yang baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Abiola (2013) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, dkk (2010) yang menyatakan bahwa setiap dilakukannya peningkatan terhadap sistem pengendalian internal, maka akan meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2014), Meldawati Girsang (2017) juga menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Karsana dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh kabupaten bangli masih terbilang cukup rendah, hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan dokumen serta catatan yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan.

H4 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemda.

Pengujian pada hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Rancangan hipotesis yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Rancangan Hipotesis